

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Sistem Informasi Keuangan**

##### **2.1.1 Konsep Sistem Informasi**

Menurut HM. Jogiyanto (2005:36) “ Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan strategi dari suatu organisasi untuk menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.”

##### **2.1.2 Konsep Akutansi**

Menurut Ahmad Riahi (2006:50) “ Akutansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengintisarian dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.”

##### **2.1.3 Konsep Laporan Keuangan**

Menurut Jumingan (2009:4) “ Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan.”

##### **2.1.4 Jurnal**

Menurut Mulyadi (2001:101) “ Jurnal merupakan akuntansi permanen, yang pertama digunakan untuk mencatat keuangan perusahaan.”

##### **2.1.5 Buku Besar**

Menurut Mulyadi (2001:121) “ Buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang tercatat dalam jurnal.”

##### **2.1.6 Laporan Laba Rugi**

Menurut Warren R.F (2005:25) “ Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban selama peridoe waktu tertentu.”

### 2.1.7 Neraca

Menurut Djarwanto (2001:15) “ Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang dan modal sendiri dari suatu perusahaan tertentu pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, dan akhir tahun.” Menurut Warren R.F(2005:24) “ Neraca adalah aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu, biasanya akhir bulan atau akhir tahun.”

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Pada sistem informasi keuangan ini ada beberapa contoh penelitian tentang sistem informasi sebagai berikut :

1. “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Keuangan pada SMK Negeri 1 Girisubo Gunung Kidul Yogyakarta” oleh Wuri Dariyati

Dalam Sistem informasi keuangan ini masih belum terkomputerisasi dan masih menggunakan penggunaan Microsoft excel yang kurang efektif dan masih sering *error*. Dengan adanya sistem ini diharapkan pengerjaan data keuangan lebih akurat, efektif, cepat dari pengejaan secara manual.

2. “Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah pada SMK PGRI 1 Pacitan” oleh Nurita Wulansari, Bambang Eka Purnama, Indah Ulu Wardati

Dalam penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi yang lebih fleksibel dan dinamis serta meminimalisasi kesalahan dalam penginputan dan penyimpanan data serta mengoptimalkan keamanan data. Sehingga menghasilkan sistem informasi keuangan yang tertata baik dan membantu petugas dalam pengolahan data keuangan.

3. “Sistem Informasi Keuangan pada Sekolah ST. Agatha” oleh Wendri Tenardi, Debby Agustina, Welda

Sistem informasi keuangan ini digunakan untuk mempermudah aktivitas dari tata usaha dalam melakukan pembayaran dan pembuatan laporan keuangan sekolah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari masing-masing karyawan sekolah.

4. “Perancangan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Web pada SD Muhammadiyah Kedungpoh Gunungkidul” oleh Nanung Apriyanto

Tujuan utama dari pembuatan sistem untuk data proses keuangan yang cepat dan akurat, karena sistem manual ini menghasilkan masalah, meskipun begitu data tidak 100% akurat dan administrasi data keuangan memakan waktu yang lama.

### **2.3 Peraturan dan Undang-Undang tentang keuangan sekolah**

Tidak dapat disangkal bahwa faktor utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah pembiayaan. Pemerintah dalam hal ini mengatur pembiayaan pendidikan dalam peraturan pemerintah no.48 tahun 2008 sebagai pelaksanaan undang-undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Didalam pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah no.48 tahun 2008 diuraikan dengan jelas bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sedang pada ayat 2 dijelaskan bahwa masyarakat yang dimaksud meliputi (a) penyelenggara atau satuan yang didirikan masyarakat, (b) peserta didik, orang tua atau wali peserta didik dan (c) pihak-pihak yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Komponen dari pendanaan pendidikan ini diurai dengan terperinci baik itu dialokasikan dalam APBN yang merupakan tanggung jawab

pemerintah, APBD yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sesuai dengan sistem perundang-undangan. Adapun komponen dari biaya suatu pendidikan, biaya penyelenggaraan, biaya pengelolaan pendidikan dan biaya peserta pribadi.

Tanggung Jawab Pemerintah dalam pendanaan pendidikan oleh pemerintah pusat maupun daerah telah diatur dalam pasal 7 sampai 31 meliputi investasi biaya satuan pendidikan, investasi biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan. Biaya investasi pendidikan dan penyelenggaraan meliputi biaya lahan pendidikan dan pengelolaan pendidikan.

Tanggung jawab Masyarakat dalam pendidikan dibagi dalam 2 kategori yaitu tanggung jawab pendanaan oleh satuan yang didirikan masyarakat dan tanggung jawab pendanaan pendidikan masyarakat diluar penyelenggaraan pendidikan.